**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN PLAT
NOMOR KENDARAAN BERMOTOR YANG
DIMODIFIKASI DI INDONESIA**

Oleh : Ridhotul Hairi

Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina., S.H., M.H

Pembimbing 2 : Ferawati, S.H., M.H

Alamat : Jl. Sekolah Gg Tk No. 2A Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

Email: ridhotulhairi56@gmail.com-Telepon: 085383499254

ABSTRACT

The modification process indeed produces its own satisfaction for the owner, but it is very unfortunate because the results of these modifications often do not pay attention to legal norms and rules so that these modifications result in violating existing laws. An example is the use of modified motor vehicle license plates. In Indonesia the crime of violating the modification of motor vehicle license plates has not been clearly regulated in the laws and regulations. But it is only regulated, namely for every person who is not fitted with a license plate or motorized vehicle number that is official or determined by the police regulated in Article 280 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

The research method in this study. First, the type of research is normative law and descriptive analysis. Second, data sources are supported by primary data sources, secondary data, and tertiary data. Third, the data collection technique used is literature review. After the collected data is then analyzed qualitatively and draw conclusions with deductive thinking method that is analyzing the problem from a general form to a special form.

From the results of the problem research, there are two main things that can be concluded, First, the regulation of sanctions on the use of modified motor vehicle license plates based on Indonesian positive law refers to criminal penalties. Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Second, the imposition of sanctions is ideal to be applied to motorists who use modified motor vehicle license plates in Indonesia. The imposition of sanctions on violators of criminal offenses must be given special sanctions that can make deterrent such as imprisonment sanctions or fines.

Based on this, Indonesia should make further rules regarding criminal offenses to modify motorized vehicle number plates into a form of legislation such as laws on traffic and road transport and weighting penalties by giving appropriate sanctions to the offenses.

Keywords: Violations, Modifications, Number Plates, Motor Vehicles

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa dekade terakhir, terjadi pertumbuhan eksplosif di sektor kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan yang berada di jalan. Untuk pengelolaan lalu lintas kendaraan yang lebih baik, maka pentingnya penggunaan plat nomor kendaraan bermotor sebagai identifikasi sebuah kendaraan.¹

Pergeseran fungsi kendaraan bermotor, yang dahulunya hanya sebagai alat transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya, tampilan asli dari kendaraan bermotor terkadang kurang memuaskan bagi pemiliknya, sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan modifikasi terhadap kendaraannya agar tampil sebaik mungkin. Proses modifikasi memang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya, akan tetapi sangat disayangkan karena hasil modifikasi tersebut tak jarang tidak memperhatikan norma dan kaidah hukum sehingga modifikasi tersebut berakibat melanggar hukum yang ada.² Contohnya adalah

penggunaan plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi.

Berikut ketentuan dan cara-cara yang dilakukan oleh pemilik kendaraan memodifikasi plat nomor kendaraannya, padahal plat tersebut asli dari Kepolisian kemudian di modifikasi oleh pemilik kendaraan agar terlihat sebaik mungkin. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak sesuai dengan peraturan:³

- 1) TNKB yang hurufnya diatur, angka diubah supaya terbaca/angka diarahkan ke belakang sehingga terbaca nama
- 2) TNKB yang hurufnya diubah seperti huruf digital
- 3) TNKB ditempel stiker/logo/lambang kesatuan/instansi yang terbuat dari plastik/logam/kuningan pada kendaraan pribadi, seolah-olah pejabat
- 4) TNKB yang menggunakan huruf miring dan huruf timbul
- 5) TNKB yang dibuat di luar ukuran (terlalu besar/terlalu kecil)
- 6) TNKB diubah warna/*doff* dan ditutup mika sehingga warna berubah
- 7) TNKB yang huruf angkanya sebagian ditebalkan dan sebagian dihapus dengan cat

¹ Pawan Sharma, 2014, High Security License Plate Recognition Along With Smart Automatic Parking Management System & Parking Fee Collection. *International Journal Of Engineering Sciences & Management*. <https://web2.westlaw.com/>, diakses pada 07 Januari 2018 Pukul 20:15 WIB.

2

<http://detic.hondatiger.or.id/index.php?name=News&file=article&sid=94>, Modifikasi Untuk Pemula, Depok Tiger Club, Diakses, tanggal 11 Desember 2017

³ AKBP Budiyanto, "Begini Pelat Nomor Kendaraan Bermotor yang Diincar Polisi", *www.kompas.com*, Kamis, 17 April 2018

piloks sehingga nomor asli tersamar warna catnya, sulit untuk dibaca.

Ketentuan plat nomor kendaraan bermotor diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pada Pasal 68 disebutkan bahwa:⁴

- 1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.
- 3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
- 4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.
- 5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.

- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur sanksi bagi orang yang mengendarai kendaraan tanpa menggunakan plat nomor (TNKB) resmi dari kepolisian, yang berbunyi:⁵ “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”

Dalam hal ini banyak kasus lalu lintas yang terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu kasus mengenai penggunaan plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi. Masih banyak masyarakat yang menggunakan plat nomor yang dimodifikasi, akibatnya timbul berbagai pelanggaran dari masyarakat yang hanya untuk sebagai gaya-gayaan sampai untuk sebagai modus melakukan tindak kejahatan dengan menggunakan

⁴ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵ Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

plat nomor kendaraan yang dimodifikasi. Contohnya, dalam kasus mengenai plat nomor modifikasi atau palsu, yaitu terjadinya kejahatan pencurian yang terjadi di *showroom* di jalan Soekarno Hatta kota Pekanbaru pada hari Kamis 22 Februari 2018, sebanyak lima unit mobil yang berada didalam *showroom* dibawa kabur oleh pelaku. Dari pemeriksaan kepolisian, diduga pelaku datang menggunakan mobil dengan memasang plat nomor yang telah dimodifikasi atau yang palsu.⁶

Dari pernyataan diatas terlihat adanya kekurangan dan kelemahan dalam regulasi hukum positif Indonesia yang berkenaan dengan aturan tentang plat nomor modifikasi. karena, di dalam Pasal 68 dan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang membahas ketentuan plat nomor serta sanksi bagi pengendara yang menggunakan plat nomor modifikasi atau palsu, di dalam aturan tersebut tidak dijelaskan secara tertulis di dalam pasal, serta juga tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai pelanggaran yang dilakukan pengendara yang memakai plat modifikasi, padahal plat nomor tersebut merupakan plat resmi dari Kepolisian, tetapi

6

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/02/23/5-unit-mobil-di-showroom-ini-dicuri-pelaku-diduga-gunakan-mobil-plat-nomor-palsu?page=all>, diakses, tanggal 8 Maret 2018

dimodifikasi lagi oleh pengendara sehingga hilangnya bentuk asli dari plat nomor tersebut.

Dalam upaya pembaharuan sistem hukum di Indonesia tidak boleh menutup mata dengan perkembangan hukum Negara-negara yang ada di dunia. Oleh karena itu, untuk sempurnanya ketentuan dan sanksi yang cocok untuk pengendara yang menggunakan plat nomor modifikasi di Indonesia perlu juga dilakukan kajian komparatif antara Indonesia dan Malaysia untuk mengetahui bagaimana ketentuan dan sanksi mengenai plat nomor modifikasi atau palsu pada masing- masing Negara. Ini perlu dilakukan dalam rangka mencari suatu solusi yang lebih baik mengenai ketentuan dan penerapan sanksi yang ideal bagi pengendara yang menggunakan plat nomor yang dimodifikasi di Indonesia di masa yang akan datang. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi terhadap penggunaan plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi yang ideal untuk diterapkan bagi pengendara

yang menggunakan plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan sanksi terhadap penggunaan plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi berdasarkan hukum positif di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi yang ideal untuk diterapkan bagi pengendara yang menggunakan plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam pengaturan sanksi terhadap penggunaan plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi di Indonesia.
- b. Untuk bidang akademik, sebagai sumbangan pemikiran penulis dan dapat membantu aparat penegak hukum dalam melakukan atau menetapkan sanksi atau pelanggaran dalam pengaturan terhadap

penggunaan plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi di Indonesia pada umumnya.

- c. Untuk masyarakat, karya ilmiah ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa penggunaan plat nomor kendaraan bermotor diatur di dalam undang-undang, sehingga masyarakat tidak boleh sembarangan mengubah, memakai atau memodifikasi plat nomor kendaraan bermotor dari bentuk aslinya.

D. Kerangka teori

1. Teori Tujuan Pidana

Teori tujuan pidana yang dipakai pada penelitian ini adalah teori relatif atau teori tujuan dan teori gabungan.

- a) Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*)
Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pidana, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib

dalam masyarakat.⁷ Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- 1) Bersifat menakutkan (*afshrikking*);
 - 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering* atau *reclasing*);
 - 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).
- b) Teori gabungan (*verenigingstheorie*)
Teori ini mengajarkan bahwa hukuman bertujuan mempengaruhi tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi dari si penjahat.⁸ Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.⁹

⁷ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 157

⁸ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 193.

⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 143.

2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut ada lima, yaitu:¹¹

- a. Hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 5.

¹¹ *Ibid*, hlm. 8.

- e. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).¹³
2. Yuridis adalah menurut hukum; secara umum.¹⁴
3. Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian.¹⁵
4. Plat nomor (TNKB) adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa alat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku

dan dipasang pada kendaraan bermotor.¹⁶

5. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.¹⁷
6. Modifikasi adalah perubahan; perubahan.¹⁸
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yaitu disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²⁰ Penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang

¹² *Ibid*, hlm. 9

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 951.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 1016

¹⁵ www.kbbi.web.id, diunduh tanggal 17 Desember 2017

¹⁶ Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁸ Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, M2S, Bandung, 2000, hlm. 368.

¹⁹ C.S.T. Kansil, et. al., *Tindak Pidana Dalam Perundang-undangan Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 172.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm, 13.

telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.

Dalam penelitian hukum ini juga digunakan pendekatan komparatif, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara lain mengenai hal yang sama.²¹

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normative sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):²²

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain:

- 1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- 4) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- 6) Undang-Undang Malaysia yang mengatur tentang lalu lintas yaitu Akta Pengangkutan Jalan 1987

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal, artikel, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan, yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung dan berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan permasalahan yang akan diteliti.²³

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 95

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24.

²³ Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 103.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian normative, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.²⁴ Penulis mengumpulkan data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu metode analisis studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikan dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan metode *deduktif*, metode *deduktif* ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.²⁵

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Terhadap Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Dalam penelitian ini, peneliti fokuskan pada pengaturan sanksi terhadap pengendara yang memakai plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang merubah

bentuk dan merubah huruf atau seri angka pada plat kendaraan bermotor padahal plat nomor tersebut merupakan plat asli atau resmi dari Korlantas Polri. Dalam Pasal 39 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang berbunyi:²⁶

- 1) TNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman sesuai spesifikasi teknis.
- 2) Unsur-unsur pengaman TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa logo lintas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB.
- 3) Warna TNKB sebagai berikut:
 - a. Dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa;
 - b. Dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;
 - c. Dasar merah, tulisan putih untuk Ranmor dinas Pemerintah;
 - d. Dasar putih, tulisan biru untuk Ranmor Korps Diplomatik negara asing; dan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 251.

²⁵ Burhan Ashshafa, *Op.cit*, hlm.100.

²⁶Pasal 39 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

- e. Dasar hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas atau (*Free Trade Zone*) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa Ranmor tidak boleh dioperasikan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya.
- 4) TNKB diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.
 - 5) TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.
 - 6) TNKB dipasang pada bagian sisi depan dan belakang pada posisi yang telah disediakan pada masing-masing Ranmor.

Berdasarkan ketentuan peraturan mengenai plat nomor kendaraan bermotor atau tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:²⁷

- 1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

²⁷ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.
- 3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
 - 4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.
 - 5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.
 - 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai hal tersebut diatas diatur mengenai sanksi pelanggaran dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:²⁸ “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁸ Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)”

Dari pernyataan di atas, Bahwa selama ini dalam prakteknya, pengaturan yang mengatur tentang penggunaan plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi belum begitu jelas atau efektif, karena di dalam isi Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hanya menjelaskan mengenai sanksi bagi pengendara yang tidak dipasang plat nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Padahal selama ini banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang ditilang oleh kepolisian karena penggunaan plat nomor modifikasi yang mana plat tersebut resmi dari kepolisian tetapi dimodifikasi lagi oleh pengendara tersebut sehingga hilang bentuk asli dari plat nomor kendaraan tersebut.

B. Penjatuhan Sanksi yang Ideal untuk Diterapkan Bagi Pengendara yang Menggunakan Plat Nomor Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi di Indonesia

Disini peneliti memfokuskan pada penjatuhan sanksi yang ideal untuk diterapkan bagi pengendara yang menggunakan plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi di Indonesia.

Karena pada Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)”. Dalam isi pasal tersebut belum ada menjelaskan mengenai sanksi pengendara yang menggunakan plat nomor yang dimodifikasi yang mana kejadiannya plat nomor resmi dari Korlantas Polri tersebut diubah atau dimodifikasi lagi oleh pengendara sehingga hilangnya bentuk asli dari plat nomor tersebut.

Dalam upaya pembaharuan sistem hukum di Indonesia mengenai peraturan sanksi bagi pengendara yang memakai plat nomor modifikasi, disini peneliti melakukan kajian komparatif antara Indonesia dan Malaysia untuk mencari suatu solusi yang lebih baik mengenai ketentuan dan penerapan sanksi yang ideal bagi pengendara yang menggunakan plat nomor yang dimodifikasi di Indonesia.

Di negara Malaysia telah diatur mengenai sanksi pidana bagi warganya yang melakukan atau menggunakan plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi terdapat di dalam

Undang-Undang Malaysia Akta 333 Akta Pengangkutan Jalan 1987, pada bagian V Pasal 108 ayat (3) yang berbunyi di mana, siapa pun:

- (A) Memalsukan, mengubah, melecehkan, merusak, memutilasi, menggunakan atau meminjamkan kepada atau memungkinkan untuk digunakan oleh siapa saja yang lainnya adalah tanda, pelat atau dokumen apa pun diperlukan oleh Undang-Undang ini untuk dibawa atau dipamerkan pada kendaraan bermotor, atau sertifikat apa pun pendaftaran, lisensi, sertifikat asuransi atau sertifikat jaminan di bawah Bagian IV;
- (B) Membuat atau memiliki miliknya tanda, piring atau dokumen yang hampir mirip tanda, pelat, atau dokumen seperti itu yang disebutkan sebelumnya dihitung sebagai untuk menipu;
- (C) Mengubah catatan apa pun yang dibuat dalam sertifikat asuransi, sertifikat jaminan, buku pendaftaran, daftar, lisensi atau dokumen lain yang diterbitkan atau disimpan di bawah Undang-Undang ini;
- (D) Menerbitkan sertifikat asuransi atau sertifikat jaminan yang salah dan salah, baik sepenuhnya atau sebagian, atau menyesatkan dalam segala hal-hal materi;
- (E) Pameran pada kendaraan bermotor apa pun lisensi atau tanda identifikasi, plat atau dokumen telah diubah, dirusak, rusak, dimutilasi atau ditambahkan, atau tiruan dari lisensi, tanda, piring atau dokumen yang diperlukan di bawah Undang-Undang ini untuk dibawa atau dipamerkan pada kendaraan bermotor;
- (F) Pameran pada kendaraan bermotor apa pun lisensi atau tanda identifikasi, plat atau dokumen bukan milik kendaraan;
- (G) Menggunakan lisensi mengemudi apa pun, atau lisensi untuk bertindak sebagai sopir atau konduktor kendaraan layanan yang dipalsukan, diubah, dan rusak secara publik atau dirusak, atau lencana apa pun yang ditentukan untuk dibawa oleh orang itu, atau lisensi apa pun kepadanya tambahan tidak diizinkan oleh Undang-Undang ini atau metode apa pun di bawahnya telah dibuat;
- (H) Mengubah, merusak, menyembunyikan atau menghapus dukungan apa pun pada surat izin mengemudi atau lisensi untuk bertindak sebagai pemandu atau konduktor kendaraan layanan publik;
- (I) Untuk memberikan atau mempertahankan atau menjustifikasi persiapan atau pemeliharaan catatan palsu wajib dipelihara di bawah Undang-Undang ini; atau
- (J) Memalsukan atau mengizinkan pemalsuan catatan yang harus diberikan

berdasarkan Undang-Undang ini, Hukuman atau sanksi: dia akan bersalah karena pelanggaran dan harus dengan keyakinan akan dikenakan denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau hukuman penjara untuk sebuah istilah tidak lebih dari satu tahun atau keduanya.²⁹

Dari pernyataan diatas peneliti merumuskan hukum yang akan datang mengenai penjatuhan sanksi yang ideal untuk diterapkan bagi pengendara yang menggunakan plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang dimodifikasi di Indonesia, bahwasanya perlu negara Indonesia mencontoh atau menerapkan aturan seperti di Malaysia mengenai penjatuhan sanksi bagi pengendara yang menggunakan plat nomor modifikasi pada kendaraannya. Atau dengan dilakukannya perubahan atau menambahkan isi pasal terhadap Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang membahas mengenai sanksi tentang tanda nomor kendaraan bermotor lebih dipertegas lagi. Sehingga Kepolisian Lalu Lintas dapat menetapkan sanksi yang tepat bagi pengendara yang menggunakan plat nomor modifikasi di kendaraannya yang mana plat tersebut resmi berasal dari Korlantas Polri. Dengan

adanya penindakan dan pengaturan sanksi yang tegas, maka untuk mewujudkan tujuan daripada hukum mencapai keadilan yang berdasar kepastian hukum dan tidak ada keraguan bagi aparat penegak hukum.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum terhadap tindakan penggunaan plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi belum diatur secara jelas di dalam peraturan hukum di Indonesia terutama mengenai sanksi pidana nya, namun dalam kenyataannya tindakan ini termasuk dalam kategori pelanggaran Lalu Lintas.
2. Bahwa penjatuhan sanksi yang ideal untuk diterapkan bagi pengendara yang menggunakan plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi perlu dicontoh dari negara Malaysia. Di Malaysia telah diatur di dalam undang-undang lalu lintasnya secara jelas, bahwa menggunakan plat nomor modifikasi pada kendaraannya akan dikenakan sanksi pidana tepatnya diatur didalam Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Malaysia Akta 333 Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu di Indonesia

²⁹ Bagian V Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Malaysia Akta 333 Akta Pengangkutan Jalan 1987

sendiri tindakan penggunaan plat nomor kendaraan bermotor modifikasi belum diatur secara jelas mengenai sanksi yang tepat untuk diterapkan bagi pelanggar, yang hanya diatur yaitu bagi setiap orang yang tidak dipasang plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian tepatnya diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Saran

1. Agar perumusan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu ditinjau kembali, karena rumusan pasal tersebut dinilai kurang efektif dalam menjatuhkan sanksi bagi pengendara yang menggunakan plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi.
2. Sebagai pencegahan terjadinya tindakan penggunaan modifikasi plat nomor kendaraan bermotor di Indonesia, pemerintah harus membuat pengaturan khusus yang melarang tindakan memodifikasi atau menggunakan plat nomor kendaraan modifikasi tersebut. Bahwa tindakan hukum tersebut adalah tindak pidana yang bertentangan dengan norma hukum dan peraturan

hukum yang berlaku di Indonesia, serta perlunya juga dilakukan penindakan atau pengaturan sanksi bagi pelaku usaha pembuatan jasa modifikasi plat nomor kendaraan bermotor. Dengan tujuan agar bisa dimaksimalkan mengingat semakin membudidayanya modifikasi terhadap plat nomor kendaraan bermotor atau tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshafa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- HS, Salim, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., et. Al., 2009, *Tindak Pidana Dalam Perundang-undangan Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Praja, Juhaya S, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- _____, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan*

Hukum, Rajawali Press, Jakarta

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal/Kamus/Artikel

Pawan Sharma, 2014, High Security License Plate Recognition Along With Smart Automatic Parking Management System & Parking Fee Collection. *International Journal Of Engineering Sciences & Management*.

<https://web2.westlaw.com/>, diakses pada 07 Januari 2018

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Yandianto, 2000, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, M2S, Bandung

AKBP Budiyanto, "Begini Pelat Nomor Kendaraan Bermotor yang Diincar Polisi", *www.kompas.com*, diakses, tanggal, 17 April 2018

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

D. Website

<http://detic.hondatiger.or.id/index.php?name=News&file=article&sid=94>, *Modifikasi Untuk Pemula*, Depok Tiger Club, diakses, tanggal 11 Desember 2017

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/02/23/5-unit-mobil-di-showroom-ini-dicuri-pelaku-diduga-gunakan-mobil-plat-nomor-palsu?page=all>, diakses, tanggal 8 Maret 2018